



**Kementerian  
Perindustrian**

REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN  
PENGENDALIAN DAN  
EVALUASI  
PELAKSANAAN  
RENCANA  
PEMBANGUNAN  
INSPEKTORAT I  
TAHUN 2023**

**INSPEKTORAT I  
INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
JAKARTA, Juli 2023**

**LAPORAN RENCANA DAN CAPAIAN KEGIATAN  
INSPEKTORAT I  
TRIWULAN II  
TAHUN 2023**



**INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
JAKARTA, Juli 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya Inspektorat I dapat menyelesaikan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Periode Triwulan II Tahun Anggaran 2023.

Dasar hukum penyusunan laporan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 mengenai Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Laporan ini dibuat untuk melihat besaran sasaran keuangan dan fisik yang telah dicapai dalam pelaksanaan program kegiatan di lingkungan Inspektorat I Kementerian Perindustrian selama Triwulan II Tahun 2023.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Inspektorat I atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya membantu Inspektorat Jenderal dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang pengawasan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian.

Melalui laporan ini, kami berharap dapat memberikan gambaran obyektif tentang capaian kinerja Inspektorat I periode Triwulan II Tahun 2023. Laporan ini diharapkan juga dapat menjadi acuan dalam merencanakan, melaksanakan pada periode berikutnya.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, kami sampaikan terima kasih. Semoga laporan ini bermanfaat.

Jakarta, 5 Juli 2023

Inspektur I

The image shows a circular official stamp of the Inspector General of the Ministry of Industry. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN', 'INSPEKTORAT JENDERAL', and 'INSPEKTUR I'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name 'Bayu Fajar Nugroho' is printed in a standard font.

Bayu Fajar Nugroho

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b>	i
<b>KATA PENGANTAR</b>	ii
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Tugas Pokok dan Fungsi	1
B. Latar Belakang Kegiatan/Program	2
C. Struktur Organisasi	3
<b>BAB II : RENCANA PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>5</b>
A. Program/Kegiatan Tahun 2022	5
B. Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan	12
<b>BAB III : PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>21</b>
A. Hasil yang Telah Dicapai	21
B. Analisis Capaian Kinerja	24
C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan	27
D. Langkah Tindak Lanjut	28
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	<b>29</b>
A. Kesimpulan	29
B. Saran	30
<b>LAMPIRAN : LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN III INSPEKTORAT I TAHUN ANGGARAN 2023</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sebagai unit kerja pengawasan internal memiliki peran mendorong pencapaian tujuan dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas organisasi serta mencegah terjadinya penyimpangan, pemborosan, dan penyelewengan dari unit-unit kerja dilingkungan Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

Adapun cakupan satuan kerja Inspektorat I terdiri dari 2 unit kerja pusat yaitu Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) dengan 28 satuan kerja vertikal di lingkungan yaitu 9 satuan kerja SMK, 12. satuan kerja Politeknik dan 7 satuan kerja Balai Diklat Industri

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
2. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Internal di lingkungan Kementerian Perindustrian, dalam pelaksanaan Pengawasan Internal, Inspektorat I bertanggungjawab pada cakupan tugasnya untuk:

1. Melaksanakan kegiatan asuransi dan memberikan pendapat atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal;
2. Memberikan konsultasi dan asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola manajemen risiko dan pengendalian internal baik atas pertimbangan professional maupun atas permintaan eselon I;
3. Melaksanakan pendampingan terhadap unit eselon I yang dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan BPKP, baik atas pertimbangan professional maupun atas permintaan unit eselon I;
4. Melaksanakan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian.

## **B. Latar Belakang Kegiatan/Program**

Agar fungsi pengawasan tersebut dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program kegiatan tahun 2021 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan ditempuh.

Pelaksanaan kegiatan/program dilatarbelakangi oleh kebijakan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dalam tahun 2021 adalah :

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, dimana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* (Mitra Kerja).
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

Sedangkan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja auditi;
2. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan serta pengembangan industri;
3. Mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
4. Meningkatkan profesional aparat pengawasan;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;
6. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal;
7. Menerapkan audit berbasis resiko.

### **C. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat I terdiri dari :

#### **1. Subbagian Tata Usaha**

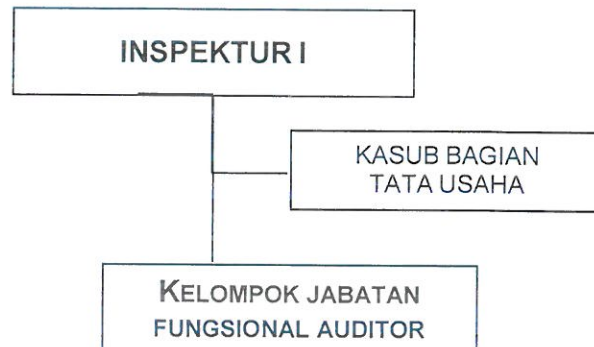
Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh pejabat eselon IV yang mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat..

#### **2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.**

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat I Kementerian Perindustrian sebagai berikut:



Bagan struktur organisasi Inspektorat I terdiri dari

1. Inspektur I
2. Subbagian Tata Usaha  
Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh pejabat eselon IV yang mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga Inspektorat I.

3. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.  
Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah auditor pada Inspektorat I sebanyak 15 orang terdiri dari:

- a. Auditor Ahli Utama : 1 orang;
- b. Auditor Ahli Madya : 1 orang;
- c. Auditor Ahli Muda : 6 orang;
- d. Auditor Ahli Pertama : 7 orang.



**BAB II**  
**RENCANA PROGRAM/KEGIATAN**

**A. Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2023**

Program Inspektorat Jenderal adalah "Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian", dan kegiatan Inspektorat I adalah **Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindtrian Cakupan Tugas Inspektorat I** dengan kegiatan kerja pada Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 1. Layanan Pengawasan Internal Inspektorat I Tahun 2023

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>KET</b>
1.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	
2.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Dokumen	
3.	Layanan Audit Internal	155 Laporan	
4.	Audit Program dan Kegiatan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I	26 Laporan	
5.	Reviu Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I	85 Laporan	
6.	Monitoring dan Evaluasi Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I	28 Laporan	
7.	Konsulting dan Pengawalan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I	4 Laporan	

Sehubungan dengan berubahnya kebijakan pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi akibat pandemic terjadi perubahan-perubahan rencana strategis Kementerian Perindustrian sehingga sasaran Rencana Strategis diubah menjadi, sebagai berikut:

**RENSTRA INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Pengelola Indikator	Cara Pengukuran
<b>Stakeholders Perspective</b>									
1	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perinduan	1 Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal *) IKU	1,50%	1,40%	1,30%	1,20%	1,00%	Ir I, II, III, IV	Menghitung jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian perindustrian yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah <1,4% total anggaran Kementerian Perindustrian atau Rumus: Temuan BPK/realisasi anggaran Belanja Kemeperin TA 2020
2		2 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	80%	85%	90%	95%	100%	Ir I, II, III, IV	Jumlah aduan yang telah masuk ke sistem Dumas berkadar pengawasan dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan berkadar pengawasan yang telah masuk ke dalam sistem Dumas
3		3 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker *) IKU	91%	91,50%	92%	92,50%	93,00%	Ir I, II, III, IV	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasi atau rumus: (SR+BSR)/total rekomendasi (T-1), Misal: Penyusunan laporan kinerja tahun 2021, maka data yang digunakan adalah data audit yang dilakukan ditahun Januari-Desember tahun 2020

2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	1	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4	Ir I, II, III, IV	Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut. Nilai yang digunakan adalah nilai indeks manajemen risiko hasil penilaian mandiri Kementerian Perindustrian yang telah mendapatkan QA oleh APIP (jika memungkinkan, dilakukan usulan revisi target berdasarkan range level 3 ke Biro Perencanaan)
<b>Internal Process Perspective</b>												
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	1	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	75%	75%	80%	80%	85%	85%	85%	Ir I, II, III, IV	Dapat diukur melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan alat bantu kuesioner yang disusun berdasarkan AAPI. Pada tahun 2023, kuesioner akan disebarakan setiap kali melakukan kegiatan pengawasan dan diolah oleh masing-masing Kasubag Tata Usaha Setiap Inspektorat disetiap akhir Triwulan dan setiap akhir tahun. Persentase tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan diperoleh berdasarkan respon auditi yang masuk dan berada pada tingkat "sangat baik". Nilai 100% diperoleh jika seluruh auditi menjawab "sangat baik" atau nilai maksimal dari setiap pertanyaan untuk semua pertanyaan dan simpulan akhir kuesioner. Cara pengukuran mengacu pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017



<i>Learn &amp; Growth Perspective</i>										
5	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	70%	80%	90%	100%	100%	Ir I, II, III, IV	Menghitung persentase tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan dengan kegiatan pengawasan yang tertuang dalam PKPT.
		2	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	80%	90%	100%	100%	100%	Ir I, II, III, IV	Kesesuaian peran pengawasan auditor dengan sertifikasi JFA terakhir yang dimiliki



Dalam melaksanakan program/kegiatan tersebut Inspektorat I pada tahun 2023 memiliki anggaran sebesar Rp 2.400.000.000,- namun pada awal bulan Januari 2023 telah ditetapkan untuk dilakukan blokir mandiri sebesar Rp. 300.000.000,-, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Alokasi Anggaran Inspektorat I Tahun 2023

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	VOL	PAGU
WA	Program Dukungan Manajemen		2.400.000.000
1841	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I		2.400.000.000
1841.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		2.400.000.000
952	Layanan Perencanaan Dan Penganggaran		22.748.000
51	<i>Penyusunan Program Kerja Dan Anggaran</i>		22.748.000
A	Penyusunan Program Kerja Dan Anggaran		22.748.000
953	Layanan Pemantauan Dan Evaluasi		43.404.000
51	<i>Penyusunan Dokumen Evaluasi Dan Akuntabilitas Inspektorat I</i>		43.404.000
A	Penyusunan Evaluasi Triwulanan Dan Tahunan		43.404.000
965	Layanan Audit Internal		2.333.848.000
51	<i>Audit Program Dan Kegiatan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I</i>		1.243.956.000
A	Pelaksanaan Audit Kinerja		1.243.956.000
52	<i>Reviu Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I</i>		283.402.000
A	Pelaksanaan Reviu Pipk Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I		31.800.000
B	Pelaksanaan Reviu Lk/bmn Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I		145.200.000
C	Pelaksanaan Reviu Rkaki Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I		76.600.000
D	Pelaksanaan Reviu Rkbnm Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I		29.802.000
53	<i>Monitoring Dan Evaluasi Tata Kelola Dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I</i>		76.600.000
A	Pelaksanaan Evaluasi Sakip Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I		76.600.000
54	<i>Konsulting Dan Pengawalan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I</i>		729.890.000
A	Pengawasan Program Dan Kegiatan Berisiko Tinggi Tahun Berjalan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I		245.030.000
B	Pembinaan Dan Pengawasan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I		271.312.000
C	Sosialisasi/pendampingan Implementasi Spip Satuan Kerja Cakupan Inspektorat I		213.548.000
	<b>TOTAL</b>		<b>2.400.000.000</b>

## B. Sasaran dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Inspektorat I yang dilaksanakan pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4. Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat I dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Jenis Indikator	Target
<b>PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN</b>				
1.	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I	IKU	1,2%
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	IK	95%
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Satker cakupan tugas Inspektorat	IKU	93%
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks penerapan Manajemen Risiko Kementerian Perindustrian	IKU	4,1
<b>PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL</b>				
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat I	IK	80%
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	IK	79%
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat I *)IKU	IKU	85%
<b>PERSPEKTIF KELEMBAGAAN</b>				
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	IK	100%
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	IK	100%



Tabel 4. Profil Perjanjian Kinerja

TABEL PERHITUNGAN												
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN												
1	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Untuk memperoleh keyakinan atas keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku										
		Jumlah temuan BPK atas laporan keuangan satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah kurang <1,4% dari satu koma empat persen.										
		$x \leq 1,2\%$ dimana $x = \frac{\Delta mt}{\Delta aa} \times 100\%$										
		<table border="1"> <tr> <td><math>x</math></td> <td>:</td> <td>batas maksimum</td> </tr> <tr> <td><math>\Delta mt</math></td> <td>:</td> <td>Jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian Perindustrian yang bernilai uang</td> </tr> <tr> <td><math>\Delta aa</math></td> <td>:</td> <td>total anggaran satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I</td> </tr> </table>	$x$	:	batas maksimum	$\Delta mt$	:	Jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian Perindustrian yang bernilai uang	$\Delta aa$	:	total anggaran satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I	
		$x$	:	batas maksimum								
		$\Delta mt$	:	Jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian Perindustrian yang bernilai uang								
$\Delta aa$	:	total anggaran satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I										
Pengaduan masyarakat berkadat pengawasan yang ditindaklanjuti	IK	85%										
Jumlah total pengaduan masyarakat yang masuk ke sistem dumas dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan yang telah masuk ke sistem dumas												
$x \geq 95\%$ dimana $x = \frac{\Delta AT}{\Delta AM} \times 100\%$												
<table border="1"> <tr> <td><math>x</math></td> <td>:</td> <td>batas maksimum</td> </tr> <tr> <td><math>\Delta AT</math></td> <td>:</td> <td>Jumlah total pengaduan masyarakat yang terdistribusi</td> </tr> <tr> <td><math>\Delta AM</math></td> <td>:</td> <td>Jumlah total total aduan yang masuk dalam sistem</td> </tr> </table>	$x$	:	batas maksimum	$\Delta AT$	:	Jumlah total pengaduan masyarakat yang terdistribusi	$\Delta AM$	:	Jumlah total total aduan yang masuk dalam sistem			
$x$	:	batas maksimum										
$\Delta AT$	:	Jumlah total pengaduan masyarakat yang terdistribusi										
$\Delta AM$	:	Jumlah total total aduan yang masuk dalam sistem										
Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Satker cakupan tugas Inspektorat	IKU	91%										
Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai dengan Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satuan kerja dibagi dengan jumlah total rekomendasi												
$x \geq 91\%$ dimana $x = \frac{\Delta RAHP}{\Delta RHP} \times 100\%$												
<table border="1"> <tr> <td><math>x</math></td> <td>:</td> <td>batas maksimum</td> </tr> <tr> <td><math>\Delta RAHP</math></td> <td>:</td> <td>Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai dengan Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi</td> </tr> <tr> <td><math>\Delta RHP</math></td> <td>:</td> <td>total rekomendasi hasil pengawasan</td> </tr> </table>	$x$	:	batas maksimum	$\Delta RAHP$	:	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai dengan Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi	$\Delta RHP$	:	total rekomendasi hasil pengawasan			
$x$	:	batas maksimum										
$\Delta RAHP$	:	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai dengan Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi										
$\Delta RHP$	:	total rekomendasi hasil pengawasan										
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks penerapan Manajemen Risiko satker cakupan tugas Inspektorat I	IKU level 3									
		Hasil penilaian Maturitas SPIP berdasarkan quality Assurance BPKP terhadap Kementerian Perindustrian										

PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL													
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kepuasan pelanggan Inspektorat I	IK	80%									
		<p>Dapat diukur melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan alat bantu kuesioner yang disusun berdasarkan AAIPI. Pada tahun 2023, kuesioner akan disebarakan setiap kali melakukan kegiatan pengawasan dan diolah oleh masing-masing Kasubag Tata Usaha Setiap Inspektorat disetiap akhir Triwulan dan setiap akhir tahun. Persentase tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan diperoleh berdasarkan respon auditi yang masuk dan berada pada tingkat "sangat baik". Nilai 100% diperoleh jika seluruh auditi menjawab "sangat baik" atau nilai maksimal dari setiap pertanyaan untuk semua pertanyaan dan simpulan akhir kuesioner. Cara pengukuran mengacu pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017.</p>											
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	IK	76%									
		<p>Pengukuran Kegiatan TABK dilakukan hanya pada Kegiatan Audit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahap Perencanaan: Menerapkan RBA (Risk Based Audit) Kuantitatif dalam penetapan sampling audit. Cara Pengukuran, apakah pada saat audit auditor menggunakan analisis untuk menentukan sampling</li> <li>- Tahap Pengumpulan data yang akan diuji menggunakan Sipantau, E-mon, dan SAS (Screenshot penggunaan aplikasi) *pemberian akses ke seluruh auditor</li> <li>- Penelaahan analisis, menggunakan alat bantu komputer (Excel,SQL, Access, dll) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bukti Hasil Telaahan pada semua keg Pengawasan</li> <li>• Penyusunan kertas kerja pemeriksaan menggunakan Aplikasi komputer (Dropbox, MSteam,Gdrive, dll)</li> </ul> </li> <li>- Ikhtisar, sort, merge, split, ratio untuk analisis data <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahap Pelaporan menggunakan Office</li> </ul> </li> </ul>											
	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat I	IKU	85%									
		<p>Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111 dimana</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>dimana <math>x \geq 85\%</math></p> <math display="block">x = \frac{\Delta RP3DN}{\Delta RTP3DNP} \times 100\%</math> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"><math>x</math></td> <td style="width: 5%;">:</td> <td>Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri</td> </tr> <tr> <td><math>\Delta RP3DN</math></td> <td>:</td> <td>Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk DN.</td> </tr> <tr> <td><math>\Delta RTP3DN</math></td> <td>:</td> <td>Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun.</td> </tr> </table>			$x$	:	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri	$\Delta RP3DN$	:	Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk DN.	$\Delta RTP3DN$	:	Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun.
$x$	:	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri											
$\Delta RP3DN$	:	Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk DN.											
$\Delta RTP3DN$	:	Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun.											

PERSPEKTIF KELEMBAGAAN												
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	70%									
		<p>Tingkat kesesuaian dalam hal jadwal dan komposisi tim dengan yang tertuang dalam dokumen PKPT (dengan toleransi maksimal 1 s/d 4 hari).</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p style="text-align: center;"><math>x \geq 70\%</math></p> <p>dimana</p> <math display="block">x = \frac{\Delta RSP}{\Delta RP} \times 100\%</math> </div> <table border="1" style="margin: 10px auto; width: 80%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><math>x</math></td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>batas maksimum</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><math>\Delta RSP</math></td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>Jumlah Pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><math>\Delta RP</math></td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>Jumlah rencana Pengawasan</td> </tr> </table>	$x$	:	batas maksimum	$\Delta RSP$	:	Jumlah Pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT	$\Delta RP$	:	Jumlah rencana Pengawasan	IK
$x$	:	batas maksimum										
$\Delta RSP$	:	Jumlah Pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT										
$\Delta RP$	:	Jumlah rencana Pengawasan										
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	80%									
		<p>Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan dengan sertifikasi JFA</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p style="text-align: center;"><math>x \geq 80\%</math></p> <p>dimana</p> <math display="block">x = \frac{\Delta JFA}{\Delta JP} \times 100\%</math> </div> <table border="1" style="margin: 10px auto; width: 80%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><math>x</math></td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>batas maksimum</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><math>\Delta JFA</math></td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>Jumlah Penugasan dengan tim yang bersertifikat</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><math>\Delta JP</math></td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>Jumlah Penugasan pengawasan</td> </tr> </table>	$x$	:	batas maksimum	$\Delta JFA$	:	Jumlah Penugasan dengan tim yang bersertifikat	$\Delta JP$	:	Jumlah Penugasan pengawasan	IK
$x$	:	batas maksimum										
$\Delta JFA$	:	Jumlah Penugasan dengan tim yang bersertifikat										
$\Delta JP$	:	Jumlah Penugasan pengawasan										

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
INSPEKTORATI

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				RESIKO UTAMA	ANGGARAN	TARGET KEGIATAN				
		TW1	TW2	TW3	TW4			TW1	TW2	TW3	TW4	
Terwujudnya efektivitas dan pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja tugas Inspektorat I				1,2%	1841	Rp1.243.956.000,-	16,73%	50,18%	23,00%	10,09%	
		1. Audit Prioritas dan Program Satuannya Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I										
		2. Reviu Laporan keuangan dan BMN dan Penganggaran Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I; 3. Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola dan Kebijakan Industri Satuannya Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I						Rp. 283.402.000,-	58,49%	38,99%	-	2,52%
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti				85%			-	-	-	-	
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Satker cakupan tugas Inspektorat I *)JKU							-	-	-	
		Indeks penerapan Manajemen Risiko tugas Inspektorat I						Rp. 486.167.000,-	32,67%	32,67%	32,67%	1,99%

PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL																	
Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat I							75%			-						
	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)							77%			-						
	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri							85%			-						
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN																	
Tenujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat pelaksanaan pengawasan dengan PKPT							100%	Anggaran Kerja Inspektorat I		Rp. 32.070.000,-	24,95%	25,18%	24,95%	28,25%	28,25%	24,92%
	Tingkat kesesuaian SDM sesuai dengan perannya							100%	Evaluasi Kegiatan Inspektorat I		Rp. 8.320.000,-	28,25%	28,25%	28,25%	28,25%	15,25%	

## CAPAIAN RENCANA AKSI

Sasaran	Indikator Kinerja	Target TW I		Target TW II		Target TW III		Target TW IV		Keterangan
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	
<b>Perspektif Pemangku Kepentingan</b>										
1. Terwujudnya dan efektifitas pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	1	S1.1 - Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektoral I *)IKU	47%	47%	61%	47%	71%	100%	-	Sampai dengan Triwulan II Pagu : Rp.2.333.848.000 Realisasi : Rp.1.510.622.311 Fisik : 36% Keuangan : 64,7%
	2	S1.3 - Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan Mengikuti Penugasan Dari Inspektur Jenderal
	3	S1.4 - Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Satker cakupan tugas Inspektoral I *)IKU	25%	-	50%	-	75%	100%	-	Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut belum dapat dilakukan
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1	Indeks penerapan Manajemen Risiko cakupan tugas Inspektoral I *)IKU	25%	-	50%	-	75%	100%	-	Pelaksanaan penilaian manajemen masih memerlukan petunjuk teknis dan kriteria dari BPKP dan anggaran dilakukan <i>automatic adjustmen</i>
<b>PERSPEKTIF PROSES BISNIS</b>										
3. Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	1	Survey kepuasan Inspektoral I	80%	-	80%	-	80%	80%	-	Berdasarkan kuisisioner yang dilakukan setelah dilaksanakannya kegiatan Inspektoral I baik yang terjadwal (PKPT) ataupun permintaan dari satuan kerja;



Sebagaimana tertuang dalam tabel diatas, seluruh sasaran program tersebut telah tertuang dalam perjanjian kinerja Inspektorat I Tahun 2023. Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran tersebut dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah tertuang dalam DIPA Inspektorat I, yang dapat dilaksanakan melalui:

1. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian  
Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan:
  - a. Audit Internal
    - Melaksanakan audit kinerja pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal
    - Melaksanakan audit khusus dengan penugasan Menteri pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal
  - b. Reviu
    - Melaksanakan reviu LK-BMN pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal
    - Melaksanakan reviu pengadaan barang dan jasa dengan penugasan Menteri pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal
    - Melaksanakan reviu anggaran pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal
  - c. Monitoring
    - Melaksanakan penilaian SAKIP unit Eselon II dan UPT pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik  
Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan pendampingan implemaentasi manajemen resiko, sosialisasi, dan pembinaan pengawasan
3. Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif  
Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan;
4. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien  
Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan dan menerapkan penjaminan kualitas yang memadai;



### BAB III PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN

#### A. Hasil yang Telah Dicapai

Realisasi anggaran Inspektorat I sampai dengan Triwulan II tahun 2023 sesuai aplikasi PP39 telah mencapai 67,32% atau sebesar Rp. 1.615.800.000,- dari target 63,94%, sedangkan realisasi fisik sebesar 65,15% dari target fisik sebesar 58,91%.

Terdapat perbedaan realisasi anggaran pada aplikasi PP39 disebabkan karena adanya perbedaan waktu penginputan SP2D karena mekanisme perhitungan realisasi berdasarkan pencatatan yang telah diterbitkan pada aplikasi SAKTI yang tercatat setelah memasuki bulan April. Sementara itu, realisasi fisik kegiatan Inspektorat I telah mencapai 36,92% dari target sebesar 42,30%. Hasil ini masih memenuhi rencana kegiatan yang ditargetkan dan akan terus dilanjutkan pada Triwulan III.

Realisasi fisik dan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan Inspektorat I dapat dilihat pada Tabel 5. dan Tabel 6.

Tabel 5. Realisasi Fisik dan Keuangan untuk Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat I sesuai Aplikasi PP39

Output	PAGU Anggaran	Triwulan II		s/d Triwulan Ini		Sisa Anggaran s/d Triwulan IIV	
		Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)	%	Keuangan (Rp,-)	Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)
TAK Layanan Pengawasan Internal	2.400.000.000,-	28,23	700.560.000,-	29,19	1.615.680.000	67,32	784.320.000
						34,85	32,68

Tabel 6. Realisasi Fisik dan Keuangan untuk Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat I sesuai Aplikasi PP39

Jenis Kegiatan	PAGU Anggaran	Triwulan II		s/d Triwulan II		Sisa Anggaran s/d Triwulan IIV	
		Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)	%	Keuangan (Rp,-)	Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)
1 Audit Program Prioritas Dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	1.243.956.000	60,00	667.755.581	27,53	667.755.581	88,56	576.200.419
2 Reviu Laporan Keuangan/bmn Dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	283.400.000	1,88	786.940.67,-	27,77	275.209.740	97,11	26.003.300
Reviu PIPK	31.800.000	-	2.998.740,-	9,43	2.998.740,-	9,43	28.801.257
Reviu LK/BMN	145.200.000	-	67.692.240,-	46,62	67.692.240,-	46,62	77.507.760
Reviu RKA-K/L	76.600.000	-	7.001.240,-	9,14	7.001.240,-	9,14	-
Reviu RK-BMN	29.802.000	-	1.001.347,-	3,36	1.001.347,-	3,36	-
3 Monitoring Dan Evaluasi Tata Kelola Dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	76.600.000	-	70.602.220,-	92,17	-	-	5.997.780
4 Consulting Dan Pengawasan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	728.890.000	39,36	135.293.958,-	18,54	354.689.848	38,64	374.200.152
5 Anggaran Satuan Kerja Inspektorat I	22.748.000	50,00	-	-	18.425.880	81,00	4.323.000
6 Evaluasi Kegiatan Inspektorat I	43.404.000	50,00	23.312.288	53,71	29.649.252	68,30	13.754.748
<b>Total</b>	<b>2.400.000.000</b>	<b>28,23</b>	<b>700.560.000,-</b>	<b>29,19</b>	<b>1.615.800.000</b>	<b>67,32</b>	<b>784.200.000</b>
						<b>34,85</b>	<b>33,28</b>

Kegiatan yang telah dilakukan Inspektorat I pada Triwulan II Tahun Anggaran 2023 (April s/d Juni 2023) sebagai berikut:

Audit Kinerja dan pengelolaan Keuangan BMN pada AKA Bogor  
Audit Kinerja dan pengelolaan Keuangan BMN pada BDI Makasar  
Audit Kinerja dan pengelolaan Keuangan BMN pada BPSDMI (lanjutan)  
Audit Kinerja dan pengelolaan Keuangan BMN pada Politeknik ATI Makasar  
Audit Kinerja dan pengelolaan Keuangan BMN pada SMAK Makasar  
Audit Kinerja dan pengelolaan Keuangan BMN pada SMK SMAK Bogor  
Audit Kinerja dan pengelolaan Keuangan BMN pada SMK SMTI Bandar Lampung  
Audit Kinerja dan pengelolaan Keuangan BMN pada SMTI Makasar  
Audit Kinerja dan pengelolaan Keuangan BMN pada STTT Bandung  
Audit Kinerja pada ATK Jogjakarta  
Audit Kinerja pada BDI jogjakarta  
Audit Kinerja pada BDI Padang  
Audit Kinerja pada ITPT Surakarta  
audit kinerja pada Politeknik ATI Padang  
Audit kinerja pada SMK SMAK padang  
Audit Kinerja pada SMK SMTI Jogjakarta  
Audit Kinerja Pada SMK SMTI padang  
Audit pada APP Jakarta  
Audit pada BDI Jakarta  
Audit pada BDI Medan  
Audit pada BDI surabaya  
Audit pada IFPK Kendal  
Audit pada PTKI medan  
audit pada STMI Jakarta  
Uji fisik Audit pekerjaan lahan SMAK Bogor

## B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Inspektorat I s/d Triwulan III Tahun Anggaran 2023 yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 6. Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat I dalam Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN TW I	TINDAK LANJUT
<b>STAKEHOLDER</b>					
1	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada Cakupan Tugas Inspektorat I/II/III/IV *)IKU	1,2%	Belum dapat diukur	
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti pada Cakupan Tugas Inspektorat I/II/III/IV	95%	Belum dapat diukur	
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker Cakupan Tugas Inspektorat I/II/III/IV *)IKU	93%	Belum dapat diukur	
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Level 3	Belum dapat diukur	

BUSSINES PROCESS					
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat I/II/III/IV	80%	Belum dapat diukur	
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	78%	Belum dapat diukur	<p>kegiatan audit dan reuiu telah dilaksanakan</p> <p>Menerapkan RBA (Risk Based Audit) Kuantitatif dalam penetapan sampling audit.</p> <p>Cara Pengukuran, apakah pada saat audit auditor menggunakan analisis untuk menentukan sampling</p> <p>- Tahap Pengumpulan data yang akan diuji menggunakan Sipantau, E-mon, dan SAS (Screenshoot penggunaan aplikasi)</p> <p>*pemberian akses ke seluruh auditor</p> <p>- Penelaahan analisis, menggunakan alat bantu komputer (Excel,SQL, Access, dll)</p> <p>*Bukti Hasil Telaahan pada semua keg Pengawasan</p> <p>-Penyusunan kertas kerja pemeriksaan menggunakan Aplikasi komputer (Dropbox, MSteam,Gdrive, dll)</p> <p>- Ikhtisar, sort, merge, split, ratio untuk analisis data</p> <p>- Tahap Pelaporan menggunakan Office</p>

LEARN AND GROWTH					
4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Insepektorat I *)IKU	80%	Belum dapat diukur	Terdapat pengukuran yang tidak dapat menunjukkan target antara.
5	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	90%	Belum dapat diukur	
		Tingkat Kesesuaian Penugasan SDM Pengawasan sesuai dengan perannya	100%	Belum dapat diukur	

### C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I, terdapat hambatan dan kendala sebagai berikut:

1. Tidak semua kegiatan dapat mendukung kinerja dikarenakan adanya pemotongan anggaran, sehingga pencapaian kinerja tidak berdampak secara signifikan terhadap kinerja Inspektorat Jenderal.
2. Metode *work from home* berdampak terhadap prosedur dan kegiatan Inspektorat I, yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan mengalami transisi dan perubahan prosedur.

#### **D. Langkah Tindak Lanjut**

Langkah tindak lanjut atas hambatan dan kendala yang dihadapi pada Triwulan II untuk meningkatkan kinerja Inspektorat I adalah melalui peningkatan kerjasama yang sinergis antara lain :

1. Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.
2. Membudayakan pengendalian resiko ke seluruh satuan kerja sehingga memudahkan pelaksanaan pengawasan.
3. Menerapkan prosedur pengawasan yang berbasis sistem informasi di Inspektorat Jenderal.



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Secara umum pelaksanaan kegiatan Inspektorat I Kementerian Perindustrian selama periode Triwulan II Tahun 2023 telah berjalan baik sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan.

Realisasi anggaran Inspektorat I sampai dengan Triwulan II tahun 2023 sesuai aplikasi PP39 telah mencapai 67,32% atau sebesar Rp. 1.615.800.000,- dari target 63,94%, sedangkan realisasi fisik sebesar 65,15% dari target fisik sebesar 58,91%.

Hasil ini masih memenuhi rencana kegiatan yang ditargetkan dan akan terus dilanjutkan pada Triwulan III. Namun Realisasi fisik belum dapat maksimal dikarenakan adanya libur dan cuti bersama yang mempersingkat waktu aktif di triwulan II.

Realisasi ini tidak dapat terukur secara real time karena terdapat perbedaan cut off data yang menimbulkan perbedaan data yang signifikan dikarenakan jadwal penginputan yang terkendala karena situasi pandemic yang memaksa bukti-bukti fisik yang harus dilampirkan dalam penginputan tertunda penyampaiannya, sehingga data yang terinput belum menunjukkan realisasi secara real time.

### **B. Saran**

Kerjasama dan koordinasi sinergi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Inspektorat I baik internal maupun eksternal perlu lebih ditingkatkan untuk mempertahankan kinerja yang telah dicapai dengan baik oleh Inspektorat I.

Demikian Laporan Inspektorat I periode Triwulan III Tahun 2023 untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

**LAMPIRAN**  
**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN – I**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**  
**INSPEKTORAT I**

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
 TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2023  
 INSPEKTORAT I

I. DATA UMUM

- 1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi : (247885) INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
- 2. Nomor Kode dan Nama Fungsi : 04. Ekonomi
- 3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi : 04.07. Industri Dan Konstruksi
- 4. Nomor Kode dan Nama Program : 04.07.WA. Program Dukungan Manajemen
- 5. Indikator Hasil : 1841 - Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tug
- 6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan : 1/1
- 7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke : Bayu Fajar Nugroho, ST, MPP
- 8. Penanggung Jawab Kegiatan : JI. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt. 5
- 9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan : SP DIPA- 019.06.1.247885/2023
- 10. Nomor Surat Pengesahan DIPA

II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN

Nomor Kode dan Nama Output	Anggaran (Rp. 000)				Indikator Keluaran (Output)	Satuan (Unit)
	No. Loan	PHLN	Rupiah	Total		
1	2	3	4	5	6	7
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal			2,400,000	2,400,000		191 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi
Total			2,400,000	2,400,000		

III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT

Output	S.D. Triwulan Lalu (%)				Triwulan Ini (%)				S.D. Triwulan Ini (%)				Lokasi Kegiatan
	Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		
	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	
1													14
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	38.88	38.12	42.30	36.92	25.06	29.19	16.62	28.23	63.94	67.32	58.91	65.15	DKI JAKARTA
Jumlah	38.88	38.12	42.30	36.92	25.06	29.19	16.62	28.23	63.94	67.32	58.91	65.15	

IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No	Output	Kendala	Tindak Lanjut yang Diperlukan	Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1	2	3 TIDAK ADA KENDALA	4 -	5 -

Jakarta Selatan, Juli 2023

Inspektur I Inspektorat Jenderal



Bayu Fajar Nugroho, ST, MPP



### Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBN Inspektorat I TA 2023

Pagu anggaran pada ALKI = Rp. 2.400.000.000

No.	Kegiatan	Pagu	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1.	1841.EBD - Audit Kinerja	1.243.956.000	94,81%	88,56%	75,00%	60,00%
2.	1841.EBD - Penyusunan Rencana Dan Anggaran	22.748.000	71,51%	81,01%	50,00%	50,00%
3.	1841.EBD - Pendampingan Manajemen Resiko	213.548.000	0,00%	1,17%	0,00%	0,00%
4.	1841.EBD - Pembinaan Dan Pengawasan	271.312.000	61,98%	72,49%	50,00%	0,00%
5.	1841.EBD - Pengawasan Tahun Berjalan	245.030.000	0,00%	24,22%	50,00%	0,00%
6.	1841.EBD - Evaluasi Sakip	76.600.000	100,00%	92,17%	100,00%	0,00%
7.	1841.EBD - Reviu Rk-bmn	29.802.000	0,00%	3,36%	0,00%	0,00%
8.	1841.EBD - Reviu Rka-k/l	76.600.000	0,00%	9,14%	0,00%	0,00%
9.	1841.EBD - Reviu Lk/bmn	145.200.000	47,52%	47,44%	50,00%	50,00%
10.	1841.EBD - Reviu Pipk	31.800.000	9,43%	9,43%	100,00%	100,00%
11.	1841.EBD - Evaluasi Dan Pelaporan	43.404.000	50,94%	58,57%	70,00%	55,00%
TOTAL		2.400.000.000	63,94%	64,77%	58,91%	36,92%

Realisasi Per Akun >> Daftar Kendala >> Summary Permasalahan >>

No.	Kegiatan	Pagu	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1.	Evaluasi dan Pelaporan	43.404.000	97%	58,6%	85%	70%
2.	Audit Kinerja	1.243.956.000	95%	88,5%	75%	75%
3.	Reviu PIPK	31.800.000	9%	9,4%	100%	100%
4.	Reviu LK/BMN	145.200.000	48%	47,4%	50%	50%
5.	Reviu RKA-K/L	76.600.000	0%	9,1%	0%	0%
6.	Reviu RK-BMN	29.802.000	0%	3,4%	0%	0%
7.	Evaluasi SAKIP	76.600.000	100%	92,2%	100%	100%
8.	Pengawasan Tahun Berjalan	245.030.000	43%	56,8%	58,3%	100%
9.	Pembinaan dan Pengawasan	271.312.000	70%	78,6%	58,3%	60%
10.	Pendampingan Manajemen Resiko	213.548.000	0%	1,2%	0%	0%
11.	Penyusunan Rencana dan Anggaran	22.748.000	81%	81,0%	75%	50%

### Tahapan Kegiatan yang Harus Segera Diselesaikan

1841.EBD - Evaluasi dan Pelaporan

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	
1.	Penyusunan Laporan PP 39 Triwulan II	Juli	100%	0%	Lapor Progres   Selesai

1841.EBD - Pembinaan dan Pengawasan

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	
1.	Pembinaan dan Pengawasan unit BPSDMI dan Sekretariat Jnederal	Desember	58,3%	60%	Lapor Progres   Selesai

1841.EBD - Penyusunan Rencana dan Anggaran

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	
1.	penyusunan anggaran	Juli	100%	0%	Lapor Progres   Selesai

